



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG PARIWISATA
KOMISI X DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
KE UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR, 22—24 JUNI 2023
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022—2023**

I. Pendahuluan

Mengatasi kendala-kendala pariwisata dan ekonomi kreatif saat ini, dibutuhkan komitmen untuk meningkatkan riset dan kolaborasi yang lebih erat antara akademisi, peneliti, dan industri Parekrif. Komisi X DPR-RI memandang perlu melakukan kunjungan kerja bidang pariwisata ke lembaga/kampus yang melakukan pendidikan dan riset tentang kepariwisataan.

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
3. UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
4. UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.
5. UU No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.
6. UU No. 14 Tahun 2014 Tentang Desa.
7. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
8. UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.
9. UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
10. UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
11. UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
12. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup.
13. UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam
14. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
15. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 16 Mei 2023 tentang keputusan melakukan kunjungan kerja spesifik Bidang Pariwisata ke Poltekpar Lombok, Poltekpar Palembang dan Universitas Ciputra.

B. Maksud dan Tujuan

Tujuan Kunjungan Kerja Spesifik pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022—2023 oleh Komisi X DPR-RI adalah untuk melaksanakan fungsi pengawasan, serta mendapatkan data-data faktual dan penjelasan secara langsung dari penyelenggaraan pendidikan pariwisata di Fakultas Pariwisata Universitas Ciputra Surabaya terkait penyelenggaraan pendidikan, SDM dan riset bidang pariwisata.

C. Tim Kunjungan kerja

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022—2023 terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI. Tim ini di dampingi oleh Vinsensius Jemadu Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf/Baparekraf RI, dan Wawan Rusiawan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Kemenparekraf/Baparekraf RI. Tim juga didampingi Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR-RI serta Tim Pemberitaan Setjen DPR RI.

D. Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Universitas Ciputra Surabaya yaitu pertemuan dengan Rektor Universitas Ciputra Surabaya, Ir. Yohannes Somawiharja, yang dihadiri:

1. Dekan Fakultas Kepariwisataan Universitas Ciputra Surabaya Agoes Tinus Lis Indrianto, dan beberapa civitas Akademika Fakultas Pariwisata Universitas Ciputra Surabaya.
2. Ketua Program Studi Kepariwisataan UPN “Veteran” Jawa Timur
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
4. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya.
5. KADIN Provinsi Jawa Timur
6. Ketua/Pengurus PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia),
7. ASITA (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia),
8. HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia).
9. Generasi Pesona Indonesia (GenPI).
10. Pemangku kepentingan lainnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di Jawa Timur.

II. Isi Laporan

A. Temuan Data

Berikut data terkait pariwisata dan ekonomi kreatif berdasar jawaban tertulis dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur:

1. Terdapat beberapa bentuk dukungan pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan kepariwisataan, seperti program magang bagi pelajar/mahasiswa dalam rangka kolaborasi pengembangan program pendidikan yang berbasis kebutuhan industri. Program magang ini membantu siswa dan mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis dan memahami kebutuhan industri pariwisata.
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur melalui Bidang PSD Ekraf menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan SDM Pariwisata dengan melibatkan tenaga akademisi dan kegiatan riset bidang kepariwisataan dan juga melibatkan tenaga profesional dari akademisi, organisasi, *stakeholder* sebagai narasumber pada kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan atau Bimtek kepariwisataan yang diselenggarakan.

3. Pada Tahun 2022 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim melalui bidang Pemasaran telah melakukan kolaborasi dengan beberapa Perguruan Tinggi melalui kegiatan riset pariwisata, diantaranya Kajian *East Java Tourism Outlook* dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, dan Analisa Pasar Wisatawan Nusantara dengan FIB Universitas Brawijaya Malang.
4. Kegiatan promosi dan pemasaran destinasi pariwisata di Jawa Timur dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan citra dan daya tarik destinasi pariwisata, sehingga dapat memberikan peluang kerja yang lebih baik bagi lulusan pendidikan kepariwisataan, diantaranya:
 - a. Bursa Pariwisata: menghadirkan 50 *seller* yang berasal dari daya tarik wisata, industri pariwisata (hotel, biro perjalanan, dan restoran) dan produk transportasi Jatim.
 - b. *Direct Promotion* Kota Blitar, Kota Batu, Kota Solo (Jateng).
 - c. *Virtual Tour explore* Kab. Lumajang.
 - d. Fam Trip dengan luar negeri, yaitu media dari Penang Malaysia, Korea Selatan, dan Australia.
 - e. Pameran BBTF (*Bali Beyond Travel Fair* Kawasan ITDC) Nusa Dua Bali, dan Gebyar Wisata Nusantara JCC Jakarta.
5. Beberapa saran dan masukan bagi pengembangan pariwisata antara lain sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan dan Pelatihan. Hal ini dapat mencakup penyediaan beasiswa atau bantuan keuangan bagi calon siswa yang berpotensi namun kurang mampu secara ekonomi, serta pendirian pusat pelatihan pariwisata di berbagai wilayah Jawa Timur.
 - b. Penyusunan Kurikulum yang Relevan. Kurikulum tersebut harus mencakup pengetahuan dan ketrampilan praktis yang diperlukan oleh para tenaga kerja pariwisata, seperti manajemen pariwisata, pemasaran pariwisata, keahlian bahasa asing, dan keterampilan kerja terkait.
 - c. Peningkatan Kerjasama Riset. Dengan mendorong kolaborasi, penelitian dapat lebih terfokus pada isu-isu pariwisata yang relevan, dan hasil penelitian dapat dengan mudah diterapkan dalam praktek industri.
 - d. Pendanaan Riset Pariwisata. Ini dapat melibatkan pengadaan dana hibah riset pariwisata, penggunaan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari industri pariwisata, dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga keuangan atau mitra donor untuk mendukung riset yang berkualitas.
 - e. Pengembangan Jaringan Kolaborasi. Kolaborasi yang kuat akan memperkuat pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya, serta memfasilitasi pengembangan inisiatif dan proyek bersama yang bermanfaat bagi pariwisata di Jawa Timur.
6. Terkait Revisi UU Kepariwisata, Dinas Pariwisata Jawa Timur memberikan catatan agar RUU Kepariwisata yang baru, mampu mengadopsi beberapa hal, diantaranya:
 - a. RUU harus mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam, menyertakan ketentuan untuk pengelolaan lingkungan, pengurangan dampak

- negatif pariwisata terhadap ekosistem, dan pemeliharaan keanekaragaman hayati.
- b. RUU melibatkan dan memperhatikan pemangku kepentingan terkait, seperti pelaku industri pariwisata, komunitas lokal, akademisi, dan organisasi masyarakat. Melibatkan mereka dalam proses penyusunan kebijakan akan memastikan keberlanjutan, partisipasi, dan dukungan dari berbagai pihak.
 - c. RUU dapat mendorong pemberdayaan ekonomi lokal dengan mengutamakan partisipasi dan manfaat yang adil bagi komunitas lokal. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan produk wisata berbasis lokal, pelibatan komunitas dalam pengambilan keputusan, dan pembagian manfaat ekonomi secara merata.
 - d. RUU dapat mencerminkan pentingnya mengadopsi teknologi dan inovasi dalam pengembangan pariwisata. Mendukung penggunaan teknologi informasi, pemasaran digital, dan solusi berbasis teknologi lainnya akan membantu meningkatkan daya saing pariwisata dan meningkatkan pengalaman wisatawan.
 - e. RUU dapat mendorong peningkatan kualitas SDM di sektor pariwisata melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keahlian. Juga memperkuat dukungan terhadap riset pariwisata dengan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk penelitian, pengembangan, dan inovasi dalam sektor pariwisata.
 - f. RUU harus memperhatikan perlindungan hak dan kesejahteraan tenaga kerja di sektor pariwisata, meliputi aspek seperti upah yang layak, kondisi kerja yang aman, kesetaraan gender, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan dan pendidikan.
 - g. RUU harus mencakup kerangka pengaturan dan pengawasan yang jelas untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas, keselamatan, dan etika di sektor pariwisata.

B. Pembahasan

Beberapa hal yang disampaikan oleh para akademisi dan pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif di Jawa Timur pada pertemuan di Universitas Ciputra, antara lain:

1. Rektor Universitas Ciputra Yohannes Somawiharja, menyampaikan, antara lain bahwa:
 - a. Universitas Ciputra memiliki komitmen bahwa di setiap alur studi/konsentrasi yang ada memiliki tujuan sama yaitu membekali setiap mahasiswa agar mampu menjadi *entrepreneur* sesuai keahlian masing-masing. Pendidikan dan Praktik Entrepreneurship diberikan secara merata di semua alur studi/konsentrasi mulai dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan.
 - b. Universitas Ciputra memiliki 7 fakultas dan 1 sekolah pascasarjana untuk jenjang pendidikan sarjana, magister, doktor dan profesi dengan yang menjalani seluruh kegiatan pengajaran, pendidikan, dan penelitian. Fakultasnya Pariwisata, terdiri dari International & Hospitality Tourism Business, Bisnis Kuliner, dan Teknologi Pangan. Fakultas ini didirikan sejak 2015.

2. Dekan Fakultas Kepariwisata Universitas Ciputra Surabaya Agoes Tinus Lis Indrianto, menyampaikan paparan mengenai kelahiran dan perkembangan Fakultas Pariwisata Universitas Ciputra. Beberapa hal yang disampaikan antara lain:
 - a. Universitas Ciputra memiliki visi yaitu *to be a university that creates world-class entrepreneurs with integrity-professionalism-entrepreneurship character and nationalism who can contribute positively to Indonesia*. Saat ini memiliki 5.000 lebih mahasiswa dan 8.000 lebih alumni. Saat ini memiliki 8 Schools dan 17 Study Programs
 - b. Profil Fakultas Pariwisata (School of Tourism). Pada tahun 2006 bernama *Hotel and Tourism Management* dibawah Fakultas Manajemen. Tahun 2014, mendapatkan ijin operasional prodi pariwisata. Tahun 2016, terakreditasi B, tahun 2018, mendirikan program studi Teknologi Pangan, tahun 2021, terakreditasi baik sekali, dan tahun 2023 *student body* 662 dengan dosen 29, sehingga rasio 1: 22.
 - c. Paten di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif didaftarkan sebanyak 28 dan diterima sebanyak 20. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sejak tahun 2000—2023 di Bidang Pariwisata, adalah sebagai berikut:

Tahun	Penelitian	Pengabdian Masyarakat	Publikasi
2000 - 2021	26	35	154
2021 - 2022	14	29	179
2022 - 2023	11	21	101
Jumlah	51	85	434

- d. daya serap lulusan Prodi Pariwisata di Universitas Ciputra, naik dari tahun 200 sebesar 83,52% lulusan, menjadi 86,33% pada tahun 2021 dan menjadi 89,8% pada tahun 2022.
3. M. Nurdin Razak (Dosen Universitas Ciputra Surabaya Profesional Eco-Interpreter), menyampaikan, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Perkembangan/trend pariwisata saat ini adalah *sustainable/quality tourism*. Salah satunya adalah melalui pengembangan *ecotourism* yang terwujud melalui *socio-preneurship* yang terbukti mampu bertahan dan mengangkat masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif dari keterpurukan akibat Covid-19.
 - b. Tugas selanjutnya adalah mengempowering desa wisata untuk mengembangkan *socio-preneurship* yang berbasis *ecotourism* tersebut. Hal ini pernah dilakukan di berbagai tempat di Indonesia.
 - c. Salah satu permasalahan dalam mengembangkan *ecotourism* adalah tidak sinkron antara kebijakan Kemenpar dan KLH. Beberapa daerah yang dimungkinkan berkembang *ecotourism* ada di wilayah konservasi yang berada dalam koordinasi KLH.
 - d. Selain itu, permasalahan lainnya adalah membangun SDM yang memiliki wawasan *ecotourism*. Dalam pengembangan SDM ini, yang paling signifikan adalah pendampingan, bukan sekedar ToT (*training of trainer*). ToT memang membantu pelaksanaan konsep

socio-preneurship, tetapi pendampingan menjadi lebih penting karena ada monitoring setiap saat.

4. ASITA Jawa Timur, menyampaikan antara lain bahwa salah satu yang diperlukan adalah mendapatkan objek wisata yang terpencil dan tidak terkenal namun sangat diketahui oleh masyarakat sekitarnya, sehingga dengan konsep *ecotourism* tempat tersebut dikembangkan. Selain itu, SDM juga diperlukan, sehingga diharapkan agar perguruan tinggi (seperti Universitas Ciputra) dapat menghasilkan mahasiswa yang memahami hal tersebut. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah memahami kebiasaan pengelolaan wisatawan di Jepang yang bersih dalam mengelola kamar mandinya.
5. Pengurus KADIN Jawa Timur (Prof. Thomas Stefanus Kaihatu, M.M) antara lain menyampaikan beberapa masukan berikut:
 - a. Salah satu masukan penting dalam revisi UU Kepariwisata adalah masalah ketenagakerjaan, terutama persaingan antara tenaga kerja dalam negeri dengan TKA. Hal ini sulit dihindarkan akibat adanya *Mutual Recognition Agreement* (MRA) yang muncul dari adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN.
 - b. Tenaga kerja kita hanya bersertifikasi dalam negeri dan harus berhadapan dengan tenaga kerja yang memiliki sertifikasi ASEAN. Investasi asing juga dibuka lebar, sehingga persaingan ketenagakerjaan makin ketat. Tenaga kerja kita tidak siap menghadapi persaingan ini.
 - c. Artinya, dalam hal pariwisata dan ekonomi kreatif ini, ada persaingan investasi di satu sisi dan persaingan sertifikasi di sisi lainnya. Sehingga RUU kepariwisataan harus memberikan solusinya.
6. HPI Jawa Timur, menyampaikan masukan bahwa lisensi yang diberikan kepada mereka belum menjamin bahwa pekerjaan pramuwisata akan selalu diberikan kepada pramuwisata yang berlisensi. Banyak pramuwisata yang tidak berlisensi yang bekerja mengambil alih pekerjaan pramuwisata yang berlisensi, sehingga lisensi seolah tidak ada gunanya.
7. Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, menyampaikan antara lain, bahwa terdapat sekitar 196 Desa Wisata dari sekitar 1.436 Desa di Jawa Timur. Hal ini membutuhkan dukungan dan pendampingan dari para pegiat wisata, terutama dari kampus seperti UC dan UPN yang “ngopeni” desa wisata dengan anggaran sendiri. Kampus sangat inovatif mengembangkan wisata yang “ndesani” sehingga ada geliat ekonomi disana. Peran kampus sangat penting, mengingat anggaran pemerintah sangat kecil. Walaupun ada, sebagian besar untuk memperbaiki destinasi dan memelihara budaya.
8. Dinas Pariwisata Surabaya, menyampaikan antara lain bahwa sertifikasi/lisensi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif perlu diefektifkan. Termasuk persaingan dengan TKA perlu diantisipasi melalui sertifikasi tersebut. Masalahnya Pokdarwis saat ini juga minim sertifikasi. Dengan adanya pandemi yang memunculkan kampung

wisata, maka perbaikan pengelolaan pariwisata berbasis kampung tematik perlu dimaksimalkan.

9. Dosen Prodi Pariwisata UPN, menyampaikan dukungannya agar sertifikasi mampu lebih “menjual” para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga ada peningkatan pengelolaan yang lebih profesional.
10. Terkait beberapa masukan dari para pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif di Jawa Timur tersebut, beberapa masukan/tanggapan dari Komisi X DPR RI, antara lain adalah:
 - a. Pengembangan *ecotourism* dengan prinsip *sustainable ecologi* memang harus bisa menjadi solusi terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi, sehingga perlu koordinasi yang kuat antara lembaga Parekraf dan KLH. Pengembangan *ecotourism* yang dengan KLH, akan menjadi bahan kajian dan pertimbangan pada pembahasan RUU Tentang Desa dan RUU Pariwisata agar pelaksanaan *ecotourism* mendapat dukungan secara regulasi.
 - b. Pengembangan Desa/Kampung yang dilakukan sangat perlu dilakukan melalui pendampingan bukan sekedar pelatihan, karena salah satu yang harus diperhatikan sebagai masalah utama pariwisata dan ekonomi kreatif adalah pendanaan dan pemasaran yang harus ada solusinya.
11. Vinsensius Jemadu Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf/Baparekraf RI, antara lain menanggapi terkait koordinasi kepemparekraf dengan KLH, pendampingan pelaku pariwisata dan ekraf, anggaran parekraf, dan sumberdaya manusia parekraf. Hal hal tersebut memang perlu ditingkatkan. Selain itu, Kemenparekraf/Baparekraf RI saat ini juga fokus terhadap *medical tourism*, *wellness*, dan MICE, sebagai pengembangan pariwisata pasca pandemi.

III. Kesimpulan

Dalam kunjungan kerja spesifik ke Universitas Ciputra, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan visi dan misinya, Universitas Ciputra memiliki komitmen bahwa di setiap alur studi/konsentrasi yang ada, memiliki tujuan sama yaitu membekali setiap mahasiswa, agar mampu menjadi *entrepreneur* sesuai keahlian masing-masing. Pendidikan dan Praktik Entrepreneurship diberikan secara merata di semua alur studi/konsentrasi, mulai dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan.
2. Perguruan Tinggi (terutama yang memiliki Prodi Pariwisata) di Jawa Timur, sangat komitmen dalam membangun pariwisata dan ekonomi kreatif daerah, melalui berbagai kegiatan pendampingan dan pengembangan pariwisata berbasis pedesaan dengan metode *ecotourism* sesuai dengan perkembangan/trend pariwisata saat ini.
3. Perkembangan/*trend* pariwisata saat ini adalah *sustainable/quality tourism*. Salah satunya adalah melalui pengembangan *ecotourism* yang terwujud melalui *socio-preneurship* yang terbukti mampu bertahan dan mengangkat masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif dari keterpurukan akibat Covid-

19. Namun demikian, diperlukan *empowering* bagi pengembangan desa wisata melalui strategi *socio-preneurship* yang berbasis *ecotourism*.
4. Terdapat beberapa permasalahan dalam mengembangkan Desa Wisata/Kampung Tematik berbasis *ecotourism* tersebut, diantaranya:
 - a. tidak sinkron antara kebijakan Kemenpar dan KLH. Sinkronisasi ini merupakan hal penting mengingat beberapa daerah yang dimungkinkan berkembang berada dalam koordinasi KLH.
 - b. diperlukan pembangunan SDM yang memiliki wawasan *ecotourism* melalui pendampingan, bukan sekedar ToT (*training of trainer*). ToT memang membantu pelaksanaan konsep *socio-preneurship*, tetapi pendampingan menjadi lebih penting karena ada monitoring setiap saat.
 - c. sertifikasi/lisensi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif perlu diefektifkan termasuk efektifitas kepada Pokdarwis. Termasuk persaingan dengan TKA perlu diantisipasi melalui sertifikasi tersebut.
 5. Beberapa masukan bagi pengembangan pariwisata antara lain (1) peningkatan aksesibilitas pendidikan dan pelatihan; (2) penyusunan kurikulum yang relevan; (3) peningkatan kerjasama riset; (4) pendanaan riset pariwisata; dan (5) pengembangan jaringan kolaborasi.
 6. Beberapa masukan terkait Perubahan UU Kepariwisata yang sedang disusun oleh Komisi X DPR RI, antara lain (1) harus komitmen terhadap lingkungan dan SDA; (2) melibatkan dan memperhatikan pemangku kepentingan terkait (industri, komunitas, akademisi, organisasi masyarakat); (3) dapat mendorong pemberdayaan ekonomi lokal; (4) mencerminkan pentingnya adopsi teknologi dan inovasi; (5) dapat mendorong peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keahlian; (6) memperhatikan perlindungan hak dan kesejahteraan tenaga kerja di sektor pariwisata; (7) mencakup kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap standar kualitas, keselamatan, dan etika di sektor pariwisata.

IV. Rekomendasi

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR-RI ke Provinsi Jawa Timur merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan pemangku kepentingan bidang pariwisata, perlu terus melakukan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan prinsip *sustainable/quality tourism*, melalui *empowering* bagi pengembangan desa/kampung wisata dengan strategi *socio-preneurship* yang berbasis *ecotourism*.
2. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan bidang pariwisata perlu fokus dalam menyelesaikan beberapa permasalahan utama yang muncul dalam mengembangkan Desa/Kampung Wisata berbasis *ecotourism*, diantaranya terkait:
 - a. sinkronisasi kebijakan bidang parekrif dengan kehutanan/lingkungan hidup;
 - b. pembembangan SDM yang memiliki wawasan *ecotourism* melalui pendampingan, bukan sekedar ToT (*training of trainer*);
 - c. memaksimalkan efektifitas sertifikasi/lisensi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya bagi pelaku parekrif dalam komunitas Pokdarwis.

V. Penutup

Demikian laporan kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR-RI ke Provinsi Jawa Timur sebagai bahan kajian dan landasan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut dalam rapat dengan mitra kerja Komisi X DPR RI.

Jakarta, 24 Juni 2023
Ketua Tim,

Ttd.

Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI